

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Edward III, George C. (1980). *Pelaksanaan Kebijakan Publik*. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press.
- Moleong, L. J. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2018). *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi dan Kimia Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Afni, N. (2016) *Area abu-abu sertifikasi guru*. Lhokseumawe: Universitas Malikussaleh.
- Nurmantu, S. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Nurmantu, S. (2013). *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, dan Aspek Hukum*. Jakarta: Indeks.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2001). *Catatan Praktik Pengukuran Kepatuhan*. Paris: OECD Publishing.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan: Teori dan Teknis Pemungutan Pajak*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rogers, Everett M., & Shoemaker, F. Floyd. (1971). *Komunikasi Inovasi: Suatu Pendekatan Lintas Budaya*. New York: Free Press.
- Safri, N. (2011). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Safrin, M. (2013). *Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supramono, & Damayanti, T. (2010). *Perpajakan: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Andi.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Center for Academic Publishing Service (CAPS).

Jurnal/Tesis

- Ajzen, Icek. (1991). *Teori Perilaku Terencana. Perilaku Organisasi dan Proses Pengambilan Keputusan Manusia*, 50(2), 179–211.
- Brown, R. E., & Mazur, M. J. (2003). *Pendekatan Komprehensif IRS terhadap Pengukuran Kepatuhan*. *National Tax Journal*, 56(3), 689–700.
- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*. *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan*, 3(1), 126–142.
- Kurniawati, D., & Pratama, A. (2021). *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Malang*. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 22(1), 34–47.
- Meliana, & Dewi, N. M. S. S. (2022). *Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam Pelaporan Pajak: Studi Kualitatif Kabupaten Polewali Mandar*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 13(2), 115–127.
- Muliari, N., & Setiawan, P. E. (2011). *Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Akuntansi & Bisnis*, 6(2), 1–25.
- Mustikasari, E. (2007). *Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya*. *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makassar.
- Putri, D. A., & Wibowo, A. (2021). *Analisis Pengaruh Kesadaran Pajak, Sosialisasi, dan Pengawasan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah di Kabupaten Sleman*. *Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Publik*, 9(2), 115–129.
- Pratama, A. (2020). *Implementasi kebijakan pajak daerah dalam pengawasan pemungutan pajak*. Tesis Magister, Institut Pertanian Bogor (IPB University), Bogor
- Rahmawati, N., & Fadli, A. (2023). *Strategi Sosialisasi dan Pengawasan dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak Daerah di Kabupaten Bantul*. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 15(1), 42–58.
- Sari, M., & Nugroho, D. (2023). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Pengawasan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah di Kota Padang*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Pajak Daerah*, 8(1), 55–69.

Susanto, A. (2018). *Efektivitas Sosialisasi Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan, 3(2), 101–112.

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). *Proses Implementasi Kebijakan: Suatu Kerangka Konseptual (The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework)*. Administration and Society, 6(4), 445–488.

Kebijakan

Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2022*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2022: Meningkatkan Kepatuhan, Membangun Kepercayaan*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.